



Dinas
pmd
KABUPATEN LAMONGAN

Desa
Berjaya

Lamongan
Megilan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DINAS PMD LAMONGAN

Laporan Pengelolaan Risiko

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan**

Tribulan IV – Tahun 2025



dpmd.lamongan



lamongankab.go.id/dinpmd



Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 05 Januari 2026

Nomor : 400.10/ 07 /413.108/2026
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
TRIBUNAN IV Tahun 2025 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

Kepada :

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
IV Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**


JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 199711 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

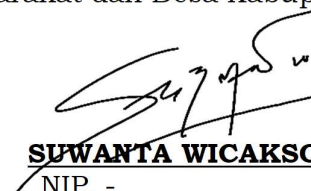

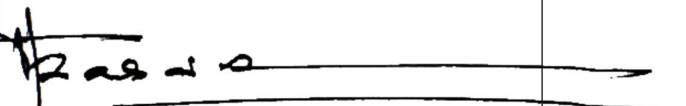
- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpm@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 400.10/ 07 /413.108/2026
TANGGAL TERBIT : 05 Oktober 2026

Disiapkan Oleh	:	Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  SUWANTA WICAKSONO, SE NIP. -
Diperiksa	:	epala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  ERWIN MAHBUB JUNIDI, SE NIP. 19790408 201001 1 007
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP NIP. 19780514 199711 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Triwulan IV sebagaimana terlampir: (lampiran form 9 dari simario berikut ini)

Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.25.13.21.01	13	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas	Wilayah Desa Tidak Tertata
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.25.13.21.02	10	DPMD - Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.25.13.21.03	12	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.25.13.21.04	12	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa	Data mengenai aset desa tidak ada	Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.25.13.21.05	11	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa	Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa	1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Siltap Kades dan Perangkat tidak bisa dicairkan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.25.13.21.06	11	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen	Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO.25.13.21.07	10	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan	Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan
Risiko Operasional OPD							
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.25.13.21.01	11	DPMD	Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas	Wilayah Desa Tidak Tertata
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.25.13.21.02	11	DPMD	Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.25.13.21.03	10	DPMD	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.25.13.21.04	11	DPMD	Data mengenai aset desa tidak ada	Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.25.13.21.05	9	DPMD	Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa	1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Siltap Kades dan Perangkat tidak bisa dicairkan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.25.13.21.06	8	DPMD	Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen	Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO.25.13.21.07	8	DPMD	Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan	Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi sekretaris desa dan kepala desa dan yang belum dilaksanakan adalah bimtek atau pelatihan bagi Operator Desa atau Tenaga IT Desa.

(lampiran, form 10 dari simario)

Penilaian Kegiatan (RTP CEE)

Simpulan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Penilaian Kegiatan (RTP CEE) / Review

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	Untuk meningkatkan lagi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024, mereviu kembali pohon kinerja atas sasaran strategis meningkatnya manajemen internal Dinas PMD dengan indikator nilai SAKIP, indikator tsb berisian, meningkatkan kinerja pada tahun 2025 untuk merealisasikan sesuai dengan target yang direncanakan	Sesuai dengan Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai terkait Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2024, maka Rencana Tindak Perbaikan dalam Lingkungan Pengendalian (Dinas PMD Kabupaten Lamongan) akan mereviu kembali pohon kinerja atas sasaran strategis, serta meningkatkan kinerja pada tahun 2025 realisasi sesuai dengan target yang direncanakan	Dinas PMD Kabupaten Lamongan	Januari - Desember
8	-	-	-	-

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa						
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.25.13.21.01	Sosialisasi Batas Desa	-	Sosialisasi Batas Desa	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Januari - Desember
2	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.25.13.21.02	Pelatihan Admin BUMDesa	-	Pelatihan Admin BUMDesa	DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.25.13.21.03	Bimtek Kapasitas Operator Desa	-	Bimtek Kapasitas Operator Desa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
4	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.25.13.21.04	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
5	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.25.13.21.05	Monev ABDesa	-	Monev ABDesa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
6	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.25.13.21.06	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember
7	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO.25.13.21.07	Pelatihan Administrasi PKK	-	Pelatihan Administrasi PKK	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.25.13.21.01	Melengkapi Tanda Batas Desa	-	Melengkapi Tanda Batas Desa	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Januari - Desember
2	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.25.13.21.02	Memahani Pengelolaan BUMDesa	-	Memahani Pengelolaan BUMDesa	DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.25.13.21.03	Perekrutan Perangkat Desa/ Operator Desa	-	Perekrutan Perangkat Desa/ Operator Desa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
4	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.25.13.21.04	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
5	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.25.13.21.05	Monev ABDesa	-	Monev ABDesa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
6	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.25.13.21.06	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	-	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember
7	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO.25.13.21.07	Pelatihan Administrasi PKK	-	Pelatihan Administrasi PKK	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

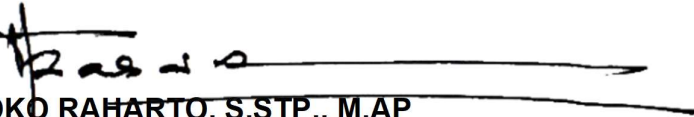
Formulir Kertas Kerja							
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa						
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Sosialisasi Batas Desa	Sosialisasi	DPMD	Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
2	Pelatihan Admin BUMDesa	Bimtek	DPMD	Direktur dan Anggota BUMDes	Januari - Desember	Januari - Desember	-
3	Bimtek Kapasitas Operator Desa	Bimtek	DPMD	Operator Desa/ Sekdes	Januari - Desember	Januari - Desember	-
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Pelatihan	DPMD	LPM/BPD/Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
5	Monev ABDesa	Monev	DPMD	Perangkat Desa, Bendahara Desa, Sekdes, Kades	Januari - Desember	Januari - Desember	-
6	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Pelatihan	DPMD	Lembaga Desa, PKK	Januari - Desember	Januari - Desember	-
7	Pelatihan Administrasi PKK	Pelatihan	DPMD	Lembaga Desa, PKK	Januari - Desember	Januari - Desember	-
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Melengkapi Tanda Batas Desa	Penegasan Batas Desa	Pemerintah Desa	Masyarakat Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
2	Memahani Pengelolaan BUMDesa	Kelola BUMDesa	BUMDesa	BUMDesa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
3	Perekrutan Perangkat Desa/ Operator Desa	Pengangkatan Perangkat Desa/ Operator Desa	Pemerintah Desa	Operator/ Perangkat Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Pengetahuan Lembaga Desa	Pemerintah Desa	BPD/ LPM/ Lembaga Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
5	Monev ABDesa	Monev APBDesa	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
6	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	Pengetahuan Lembaga Desa	Pemerintah Desa	BPD/ LPM/ Lembaga Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
7	Pelatihan Administrasi PKK	Pengetahuan Administrasi PKK	Pemerintah Desa	Lembaga Desa/ PKK	Januari - Desember	Januari - Desember	-

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan *time management* atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN


JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 199711 1 001

LAMPIRAN

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang dinilai : 2025
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kemandirian Desa
Sasaran strategis OPD : - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akutabilitas Pelayanan Publik
Usuran Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko			Pemilik	Sebab ^{*)}		C/UC	Dampak ^{*)}		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada ^{*)}	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				Uraian	Kode Risiko	f		g	h		i	k					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	d	e	f	g	h	
		Presentase Desa Mandiri	Tahap Perencanaan	Pengisian Aplikasi idak terisi	RSO.25.13.21.01	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	- Masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait indikator pengungkit dalam mewujudkan Desa Mandiri - Masih kurangnya koordinasi antar OPD dilingkungan Pemkab dan Pemdes dan Instansi lainnya dalam melaksanakan Program Desa Mandiri - Masih belum maksimalnya Sumber Daya Aparatur pelaksana Program Desa Mandiri - Belum maksimalnya penyusunan perencanaan pendanaan dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri	Internal	C	Tidak keluarnya Nilai Indeks Desa	Desa/Pemerintah Daerah	Berdasarkan Surat dari Berita acara Verifikasi dan Validasi Indeks Desa tingkat Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 bulan Juli Tahun 2025, dan berikut link Drive data : https://drive.google.com/filed/1RD4wTYUahQFOWMLYjKdsZfsaI3Gdc5View?usp=sharing	Tidak membaca regulasi yang diterapkan	Sosialisasi Indeks Desa	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Januari - Juni	
													Facilitasi Penyusunan Indeks Desa			Juli - September	
		Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tahap Pelaksanaan	Ketengkapan Dokumen	RSO.25.13.21.02	DPMD - Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan managerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	Internal	C	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat	Desa/Pemerintah Daerah	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember	
		Persentase KM Perangkat Daerah	Tahap Pelaksanaan		RSO.25.13.21.03	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Internal	C	Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi	Desa/Pemerintah Daerah	Movev ABDesa	-	Movev ABDesa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember	
		Nilai Manajemen Risiko	Tahap Pelaksanaan	Tidak Menyusun MR	ROO.25.13.21.04	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa	Data mengenai aset desa tidak ada	Internal	C	Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan	Desa/Pemerintah Daerah	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang tepat Waktu															
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tahap Perencanaan	Terlambatnya dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Rencana Kerja Anggaran (RKA)	ROO.25.13.21.005	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Kurangnya Pemahaman dan terbasatnya Jaringan/ Server SIPD-RI	Internal dan Eksternal	C	Penyusunan Dokumen Perencanaan menjadi kurang maksimal	Dinas PMD Lamongan	Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI - Berkoordinasi dengan Pihak anggaran BPKAD terkait penyusunan perencanaan anggaran RKA	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilingkup OPD - Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Tribunal 1 (Januari, Februari, Maret)	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tahap Pelaksanaan	Keterlambatan dalam Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ROO.25.13.21.006	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Terkendata keaktifan Bidang terkait ketika dimintai data	Internal	C	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menjadi kurang maksimal	Dinas PMD Lamongan	Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi antar Bidang	Melakukan Evaluasi RENJA OPD	- Melaksanakan Rapat Koordinasi antar Bidang - Penandatanganan Perjanjian Kinerja PPTK	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Februari & Oktober	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahap Pelaksanaan	Tidak terseleenggaranya kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ROO.25.13.21.007	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Terkendata data dari Bidang terkait	Internal	C	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menjadi terhambat dan tidak maksimal (LPDP, LKJP, LKJP, SKM)	Dinas PMD Lamongan	Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan Selda, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda	Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui LPDP, LKJP, LKJP dan SKM	- Melaksanakan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda terkait Laporan Evaluasi Kinerja - Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui LPDP, LKJP, LKJP dan SKM	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Oktober, November, Desember	
2	Administrasi Keuangan	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu															
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahap Pelaksanaan	Terlambatnya dalam penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	ROO.25.13.21.008	Sub Bagian Keuangan	Anggaran Tidak Mencukupi	Internal / Eksternal	C	Tidak tercapainya Kesejahteraan ASN	ASN di lingkungan Dinas PMD Lamongan	Penganggaran Gaji dan Tunjangan dilakukan sesuai kebutuhan	Validasi Anggaran dilakukan tepat waktu	Penganggaran dan Validasi Gaji dan Tunjangan sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu	Sub Bagian Keuangan	1 Bulan	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tahap Pelaksanaan	Rencana Pelaporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tidak sesuai dengan jadwal penganggaran (terlambat)	ROO.25.13.21.009	Sub Bagian Keuangan	SDM Pelayanan yang Belum Optimal	Internal / Eksternal	C	Tidak sesuai dengan jadwal penganggaran	DPMD Lamongan	Pelaporan bulanan	Pelaporan bulanan dilakukan tepat waktu	Pelaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Bagian Keuangan	Januari - Desember 2025	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahap Pelaksanaan	Rencana Pelaporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tidak sesuai dengan jadwal penganggaran (terlambat)	ROO.25.13.21.010	Sub Bagian Keuangan	SDM Pelayanan yang Belum Optimal	Internal / Eksternal	C	Tidak sesuai dengan jadwal penganggaran	DPMD Lamongan	Pelaporan Semesteran dan Tahunan	Pelaporan semesteran dan tahunan dilakukan tepat waktu	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Bagian Keuangan	Juni dan Desember 2025	
	Administrasi Kepegawaian	Prosentase disiplin aparatur															
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakelan Dinas beserta Alibut Ketengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Alibut Ketengkapannya	Tahap Pelaksanaan	Risiko spesifikasi dan kualitas	ROO.25.13.21.011	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Finansial kurangnya anggaran	Internal	C	Pengadaan seragam dinas sering kali menelan biaya yang signifikan	Dinas PMD	Pengadaan pakaian dinas sesuai anggaran	Koordinasi pihak ke tiga terkait pengadaan pakaian dinas sesuai anggaran	Koordinasi pihak ke tiga terkait pengadaan pakaian dinas sesuai anggaran	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Apr-25	

	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tahap Pelaksanaan	Risiko Kinerja, Risiko Operasional, dan Risiko strategis dan reputasi	ROO.25.13.21.012	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	untuk memastikan pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dan dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab spesifik jabatan mereka secara efektif dan profesional.	Internal	C	Kurangnya Inisiatif dan Kreativitas	Dinas PMD	Adanya komitmen tertulis dan diuraikan oleh pimpinan untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang kompeten sesuai tugas dan fungsi masing-masing.	mengacu pada potensi risiko atau kelemahan dalam sistem manajemen yang dapat menghambat pencapaian tujuan diklat itu sendiri	mengacu pada potensi risiko atau kelemahan dalam sistem manajemen yang dapat menghambat pencapaian tujuan diklat itu sendiri	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Apr-25
	Administrasi Umum	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik														
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tahap Pelaksanaan	Kebakaran akibat korsleting, sengatan listrik kabel tertebus dan kerusakan peralatan dan material	ROO.25.13.21.013	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	mendukung operasional, meningkatkan kinerja pegawai, dan menjaga kelancaran tugas administrasi dengan menyediakan infrastruktur penerangan yang memadai.	Internal	C	Komponen listrik berkualitas rendah cenderung opsal rusak dan memiliki tingkat kebocoran arus yang tinggi	Dinas PMD	menakup beberapa tahapan utama, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dan didasarkan pada standar serta prosedur yang berlaku, seperti yang tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).	Kurangnya identifikasi beban listrik ril kantor menyebabkan pengadaaan komponen (seperti MCB atau kabel) yang tidak sesuai	Kurangnya identifikasi beban listrik ril kantor menyebabkan pengadaaan komponen (seperti MCB atau kabel) yang tidak sesuai	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Maret dan mei 2025
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahap Pelaksanaan	Risiko Operasional keterlambatan pengiriman,kerusakan, kehilangan. Risiko pasokan dan vendor. Risiko finansial dan eternal	ROO.25.13.21.014	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	menunjang kelancaran administrasi dan kinerja pegawai, memastikan ketersediaan kebutuhan sehari-hari seperti alat tulis, kertas, bahan bakar. hingga konsumsi rapat agar pekerjaan kantor berjalan efektif, efisien, dan pelayanan publik optimal	Internal	C	Bahan logistik yang berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan menyebabkan biaya pengadaaan dan penyimpanan meningkat	Dinas PMD	Kebutuhan logistik diidentifikasi dan direncanakan secara periodik (misalnya per bulan atau per tahun) berdasarkan kebutuhan operasional yang nyata.	sistem manual. kurangnya pengawasan dan ketidakeksekuan antara pencatatan dan kondisi fisik barang.	sistem manual, kurangnya pengawasan dan ketidakeksekuan antara pencatatan dan kondisi fisik barang.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Maret dan april 2025
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tahap Pelaksanaan	Risiko Operasional proses produksi keterlambatan risiko kualitas hasil tidak sesuai dan biaya tinggi	ROO.25.13.21.015	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kebutuhan administrasi rutin kantor sangat bergantung pada ketersediaan barang cetak dan layanan penggandaan.	Internal	C	mengeola dokumen fisik membutuhkan waktu dan tenaga, yang dapat mengurangi produktivitas dibandingkan dengan sistem manajemen dokumen digital yang efisien	Dinas PMD	Unit kerja mengajukan kebutuhan barang cetak dan penggandaan secara terencana untuk satu tahun anggaran	Kurangnya definisi yang jelas mengenai kualitas, format, dan jumlah barang cetakan yang diperlukan dapat menyebabkan pemborosan atau hasil yang tidak sesuai kebutuhan	Kurangnya definisi yang jelas mengenai kualitas, format, dan jumlah barang cetakan yang diperlukan dapat menyebabkan pemborosan atau hasil yang tidak sesuai kebutuhan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Maret dan april 2026
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tahap Pelaksanaan	Risiko yang timbul dari kelemahan hukum. Kegagalan prosedur, proses, sistem atau kesalahan manusia dalam menyusun	ROO.25.13.21.016	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	untuk memenuhi kebutuhan informasi, meningkatkan wawasan, dan menunjang pelaksanaan tugas baik bagi aparat sipil negara maupun masyarakat umum	Internal	C	Pembentukan peraturan tidak baik, kuantitasnya berlebihan, atau isinya tidak sinkron	Dinas PMD	menakup prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan terhadap peraturan yang berlaku. Berikut adalah	Pengadaan yang Kurang Terstruktur	Pengadaan yang Kurang Terstruktur	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Januari s/d oktober 2025
	Sub Kegiatan : Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahap Pelaksanaan	risiko pelaksanaan (biaya, waktu, peserta tidak hadir/ruks), risiko substansi (kurang efektif, tidak ada tindak lanjut, miskomunikasi), hingga risiko administrasi/manajemen (dokumen tidak lengkap, dana tidak sesuai, potensi penyimpangan).	ROO.25.13.21.017	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	menyamakan persepsi, memper lancar pelaksanaan tugas dan fungsi, memecahkan masalah antar-instansi, serta sinkronisasi program kerja pemerintah daerah	Internal	C	Pemborosan Anggaran Ketidakefisienan Waktu dan Sumber Daya	Dinas PMD	menakup tahapan persiapan (KAK, jadwal, tim), pelaksanaan (monitoring, evaluasi, pencatatan anggaran), hingga pelaporan, dengan fokus pada verifikasi dokumen keuangan, pencatatan SPJ	Perencanaan yang Tidak Optimal	Perencanaan yang Tidak Optimal	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Februari s/d oktober 2025
	Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	Sub Kegiatan : Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tahap Pelaksanaan	Risiko pengadaaan mesin alat peralatan dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual atau tidak kompatibel dengan sistem yang ada		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas layanan di Instansi pemerintah	Internal	C	Aset Tidak Efektif dan biaya pemeliharaan tinggi	Dinas PMD	Memastikan peralatan dan mesin yang akan diadakan benar-benar dibutuhkan dan berfungsi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Februari s/d oktober 2025
	Penyediaan Jasa Pengungun Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tahap Pelaksanaan	gagalan infrastruktur, bencana alam, masalah keamanan (baik fisik maupun siber), dan kendala regulasi		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	memper lancarak tugas pokok, pelayanan publik, dan administrasi	Internal	C	Informasi yang Kurang Terebair Luas, Infrastruktur yang Kurang Optimal dan Beban biaya operasional	Dinas PMD	Penyenggaraan jasa komunikasi wajib memiliki izin resmi dari Kemkominfo untuk beroperasi secara legal.	kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Januari s/d november 2025
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tahap Pelaksanaan	Ketidakakuratan Perencanaan dan Pengelolaan Stok		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	memenuhi kebutuhan administrasi rutin, menganggr barang rusak/habis, serta mendukung efisiensi kerja agar target organisasi tercapai dengan baik dan efisien.	Internal	C	Gangguan Akr Kerja peralatan tidak memadai	Dinas PMD	Menentukan prioritas pengadaaan untuk mengelola anggaran secara efektif dan memastikan ketersediaan barang yang paling kritis terlebih dahulu.	Perencanaan dan identifikasi Kebutuhan yang Tidak Akurat	Perencanaan dan identifikasi Kebutuhan yang Tidak Akurat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Februari s/d oktober 2025
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tahap Pelaksanaan	risiko operasional (kerusakan sistem, kesehatan SDM, keterlambatan pembayaran tagihan listrik/air/telepon), risiko keuangan (telambatnya pencairan anggaran tunjangan kinerja), risiko regulasi (perubahan aturan), risiko pasokan (keturunan ATK/perengkapan), hingga risiko teknologi (keamanan siber)		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	memper lancarak operasional dan administrasi pemerintahan dengan menyediakan fasilitas dan tenaga pendukung	Internal	C	inefisiensi, kurangnya profesionalisme, dan birokrasi yang berbelit.	Dinas PMD	memastikan jasa administrasi perkantoran (seperti honorarium tenaga honorur, konsumsi rapat, dan jasa penunjang) berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan, mencakup pengawasan kinerja petugas, pengelolaan keluhan, evaluasi rutin, hingga penetapan sistem SIPP untuk mengurangi risiko	Kelemahan Sistem dan Prosedur	Kelemahan Sistem dan Prosedur	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Januari s/d Desember 2025
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perangran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perangran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tahap Pelaksanaan	ketidakepatan administrasi, potensi penyalanggunaan anggran/asas, biaya tak terduga akibat kecelakaan, keterlambatan pelayanan (pajak/kersiv), hingga masalah hukum dan sanksi		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	menunjang kelancaran tugas dan fungsi pelayanan publik pemerintah, memastikan operasional kendaraan tetap optimal, aman, dan efisien	Internal	C	penyalanggunaan aset (kendaraan dipakai pribadi/tidak sesuai peruntukan), menurunkan akuntabilitas publik	Dinas PMD	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merinci kebutuhan jasa pemeliharaan, suku cadang, dan pembayaran pajak untuk tahun anggaran tertentu.	minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalanggunaan wewenang untuk pribadi, ketidakefisienan standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaaan fiktif	minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalanggunaan wewenang untuk pribadi, ketidakefisienan standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaaan fiktif	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Maret, april, Juli, Oktober 2025
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perangran Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tahap Pelaksanaan	ketidakoptimalan pengelolaan aset, potensi penyalanggunaan anggran, keterlambatan perpanjangan dokumen, biaya membengkak		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	menakup servis rutin, penggantian suku cadang, oli, BBM, hingga pengurusan STNK/Kir agar kendaraan selalu siap pakai untuk pelayanan publik dan pengawasan lapangan sesuai peraturan.	Internal	C	Biaya Perawatan Tinggi yang Tidak Terencana	Dinas PMD	proses mula dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan, melibatkan Bendahara Pengeluaran, PPK-PD, dan Pengraa Anggaran, dengan memastikan dokumen lengkap, pembayaran tepat sesuai jadwal (pajak/perizinan), pencatatan akuntansi yang benar, dan pelaporan yang akurat (SPJ) sesuai peraturan untuk menjamin efisiensi dan kepatuhan hukum.	kurangnya transparansi, kontrol, dan akuntabilitas	kurangnya transparansi, kontrol, dan akuntabilitas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Januari s/d oktober 2025
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tahap Pelaksanaan	menakup aspek keselamatan pekerja, kerusakan finansial, dan dampak operasional/lingkungan.		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama, yang mencakup faktor teknis, operasional, dan lingkungan.	Internal	C	Biaya Perbaikan Darurat yang Tinggi	Dinas PMD	serangkaian aktivitas terencana dan sistematis yang bertujuan untuk menjaga aset tetap berfungsi optimal, memperpanjang usia pakainya, dan memastikan ketersediaan operasional yang tidak sesuai kebutuhan	keladuan jadwal pemeliharaan preventif yang sistematis, penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan	keladuan jadwal pemeliharaan preventif yang sistematis, penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Februari s/d oktober 2025
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan (Rehabilitasi) Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tahap Pelaksanaan	risiko struktural (kerusakan fisik), kesehatan & keselamatan (jamur, listrik rusak, kecelakaan), finansial (biaya membengkak, penurunan nilai aset), operasional (gangguan layanan), dan hukum/kepatuhan (denda, masalah sanitasi) akibat kelalaian		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	kerusakan akibat penggunaan, faktor lingkungan, dan kebutuhan untuk meningkatkan fungsi serta kenyamanan, bertujuan menjaga keamanan penghuni, memperpanjang umur bangunan	Internal	C	Risiko Keselamatan, Kesehatan dan Penurunan Kualitas Pelayanan Publik	Dinas PMD	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA): Memastikan anggaran yang dialokas sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi berdasarkan kondisi fisik bangunan.	adanya Rencana Pemeliharaan Preventif yang Terstruktur	adanya Rencana Pemeliharaan Preventif yang Terstruktur	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Apr-25
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang ditata sesuai dengan peraturan perundangan														

	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Tahap pelaksanaan	Tidak Teridentifikasi Batas Desa yang Valid		Bidang Pemerintahan Desa	Tidak Dianggarkan		Internal	C	Sengketa Tanah Wilayah Desa	Pemerintah Desa	Menggunakan C Desa atau Petak	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, integrasi dalam perencanaan tata ruang, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparat, serta pemanfaatan teknologi	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Bidang Pemerintahan Desa		TRIBUNAL IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Tahap pelaksanaan	Lunturnya Budaya Lokal		Bidang Pemerintahan Desa	Tergerus Budaya Asing		Internal	C	Hiangnya Rasa Cinta kepada Budaya Lokal dan Adab	Pemerintah Desa	Melestarikan Budaya Lokal yang ada	Kapasitas aparat desa, kurangnya pengawasan, ketidaksesuaian kewenangan dengan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat	Penyusunan peraturan yang jelas, peningkatan kapasitas aparat desa, pengawasan perilaku, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi	Bidang Pemerintahan Desa		TRIBUNAL IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Tahap pelaksanaan	Kelidakesuaan administrasi, duplikasi data, koordinasi lemah, pelanggaran regulasi, dan rendahnya akuntabilitas		Bidang Pemerintahan Desa	SDM yang kurang memahami aturan, koordinasi dan pedoman yang lemah, data tidak lengkap, serta monitoring yang tidak rutin		Internal	C	Kelidakevalidan data, duplikasi, keterlambatan administrasi, potensi sengketa hukum, dan menurunnya akuntabilitas	Pemerintah Desa	Mengikuti Keterangan Pemerintah Daerah	Kelidakesuaan nama dan kode desa dengan regulasi, kurangnya pengawasan, penyelenggaraan kewenangan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan administrasi	Memperbaiki prosedur administrasi, meningkatkan koordinasi antara desa dan pemerintah daerah, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Bidang Pemerintahan Desa		TRIBUNAL IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Tahap Pelaksanaan	Sarana dan prasarana desa dalam kondisi kurang baik		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana		Internal	C	Sarana dan prasarana tidak memadai	Desa / Pemerintah Daerah	Pengalokasian anggaran pemeliharaan telah dilakukan	Pengalokasian anggaran pemeliharaan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana desa	Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan atau pembangunan sarana dan prasarana desa	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1 Bulan	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang di fasilitasi																
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Tahap pelaksanaan	Tidak Tercapainya Kesepakatan Kerja Sama Antar Desa		Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Perbedaan Kepentingan atau Visi Antar Desa		Internal	C	Potensi Ekonomi Desa Tidak Terkelola Secara Optimal	Pemerintah Desa	Adanya koordinasi antar desa yang bekerja sama	Kerja sama antar desa kurang maksimal	Koordinasi antar desa yang bekerja sama	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Tahap Pelaksanaan	Tidak Terbentuknya Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga		Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Tidak Ada Kesepakatan Antar Pihak		Internal	C	Potensi Ekonomi Desa Tidak Terkelola Secara Optimal	Pemerintah Desa	Adanya koordinasi antar desa dengan pihak ketiga	kerja sama antar desa dengan pihak ketiga kurang maksimal	Koordinasi antar desa dengan pihak ketiga yang bekerja sama	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Sudah tidak ada anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tahap Pelaksanaan	Menghambat pemerintahan desa, merugikan masyarakat, dan dapat menimbulkan sanksi hukum.		Bidang Pemerintahan Desa	Lemahnya SDM, kurangnya pemahaman aturan, minimnya pengawasan, sarana yang tidak memadai, serta rendahnya disiplin dan integritas aparatur desa.		Internal	C	Menimbulkan Masalah dalam pelayanan, keuangan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat serta dapat menimbulkan sanksi hukum.	Pemerintah Desa	Peningkatan SDM, penertiban administrasi, pemanfaatan teknologi, pengawasan yang kuat, serta disiplin dan transparansi kerja.	Standar kerja yang jelas, pengawasan rutin, evaluasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta disiplin dan transparansi aparat desa	Mencegah dan memperbaiki kesalahan administrasi agar tata kelola desa berjalan efektif dan akuntabel	Bidang Pemerintahan Desa		TRIBUNAL IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Tahap Pelaksanaan	Kelidakepastian Program yang ada di Desa		Bidang Pemerintahan Desa	Tidak ada Dasar Hukum yang mendasar		Internal	C	Akan terjadi Penyimpangan	Pemerintah Desa	Musyawarah Desa	Pembinaan Terkait Produk Hukum Desa	Melakukan Monitoring dan Musyawarah Desa terkait Produk Hukum Desa	Bidang Pemerintahan Desa		TRIBUNAL IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tahap Pelaksanaan	APBDesa tidak tepat waktu		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tidak tercapai kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa		Internal	C	1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Siltap Kades dan perangkat tidak bisa dicairkan	Desa / Pemerintah Daerah	Pembinaan dan koordinasi penyusunan APBDesa telah dilakukan melalui camat.	Belum tersedia Perbub sebagai pedoman teknis dan monitoring perkembangan penyusunan APBDesa belum terstruktur/tepat waktu.	1. Menerbitkan Perbub tentang penyusunan APBDesa 2. Melakukan monitoring perkembangan penyusunan APBDesa melalui camat	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	3 bulan	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Tahap Pelaksanaan	Keterbatasan tenaga ahli operator di desa		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi		Internal	C	Keterlambatan pelaporan berbasis aplikasi	Desa / Pemerintah Daerah	Pendampingan penggunaan aplikasi telah dilaksanakan.	Pemahaman operator belum merata sehingga penggunaan aplikasi belum optimal.	Diadakan sosialisasi atau pelatihan kemampuan mengoperasikan atau tutorial aplikasi	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1 tahun	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Tahap Pelaksanaan	Kegagalan dalam proses dan hasil pembinaan yang dapat berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan desa		Bidang Pemerintahan Desa	Faktor perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, serta aspek sosial dan politik		Internal	C	Menurunnya kinerja aparat, rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya tata kelola desa, serta meningkatnya risiko konflik dan ketidakpercayaan masyarakat	Pemerintah Desa	Pembinaan yang aplikatif, pendampingan dan motivasi aparat, alokasi anggaran memadai, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja aparat desa melalui standarisasi kompetensi, pelatihan rutin, pendampingan, penggunaan teknologi, evaluasi kinerja, dan penghargaan	Bidang Pemerintahan Desa		TRIBUNAL IV	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Tahap Pelaksanaan	Musyawarah Desa tidak terlaksana sesuai ketentuan dan/atau laporan fasilitasi terlambat/tidak lengkap		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan Mudes tidak memadai serta kepatuhan jadwal dari desa rendah, jadwal/komitmen peserta desa.		Internal	C	Dokumen/keputusan Mudes tidak lengkap dan capaian indikator jumlah laporan fasilitasi tidak tercapai.	Desa / Pemerintah Daerah	Pembinaan, pendampingan, dan koordinasi pelaksanaan Mudes kepada desa telah dilaksanakan.	Standar format, checklist dokumen, dan verifikasi laporan Mudes belum baku sehingga laporan sering tidak lengkap/terlambat.	Menetapkan jadwal, format dan checklist dokumen Mudes, serta melakukan monitoring dan verifikasi laporan sebelum diadkan.	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1 bulan	
	Sub Kegiatan : Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tahap Pelaksanaan	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa terlambat/tidak lengkap sehingga dokumen hasil evaluasi tidak terpenuhi.		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Penyampaian dokumen Perdes dari desa terlambat dan kapasitas evaluasi terbatas.		Internal	C	Perdes berpotensi tidak sesuai ketentuan dan indikator dokumen hasil evaluasi tidak tercapai.	Desa / Pemerintah Daerah	Koordinasi pembinaan dan pelaksanaan evaluasi Perdes telah dilakukan.	Jadwal dan kriteria evaluasi belum baku sehingga proses dan dokumentasi sering terlambat.	Menetapkan jadwal dan kriteria evaluasi serta memonitor penyampaian Perdes dan penyusunan dokumen hasil evaluasi.	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1 bulan	
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Tahap Pelaksanaan	Pengembangan BUMDesa tidak berjalan optimal		Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi serta rendahnya pemahaman pengelola BUMDesa terhadap pengembangan usaha		Internal	C	Potensi usaha ekonomi masyarakat tidak terkelola secara maksimal	Pemerintah Desa	Koordinasi dan komunikasi dengan pengelola BUMDesa	Kurangnya Pemahaman Pemerintah Desa bahwa pentingnya peningkatan PAD melalui pengelolaan BUMDesa	Koordinasi dan komunikasi dengan pengelola BUMDesa	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Tahap Pelaksanaan	Terjadinya Penunjukan PJ dari PNS dan Juga PJ dari Perangkat Desa		Bidang Pemerintahan Desa	Meninggalnya Kepala Desa dan Diberhentikan Tidak Hormat		Internal	C	Apabila salah satu pihak calon Kepala Desa yang tidak terpilih, akan mengoreksi kinerja Kades terpilih	Pemerintah Desa	Kepala Desa Terpilih Harus merangkul semua warga termasuk pendukung yang tidak terpilih	Merangkul semua Tokoh Masyarakat	Pembinaan terhadap Kepala Desa	Bidang Pemerintahan Desa		TRIBUNAL IV



Lamongan, Desember 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
Kabupaten Lamongan


JOKO RAHARTO, S.STP., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 199711 1 001

[illegible]

